



## KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah diberikan kekuatan untuk mengemban tugas dalam Pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi di Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dan telah terselesaikannya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2016. Keterbukaan informasi sangat penting dalam kehidupan negara demokrasi, dengan keterbukaan akan terbangun kepercayaan. Kepercayaan yang tinggi antara rakyat dengan Badan Publik, akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang kredibilitasnya terakui.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Terkait dengan keterbukaan, telah banyak hal yang diimplementasikan, antara lain adalah dilakukannya kegiatan Dialog Interaktif, yakni dialog antara penyelenggara pemerintahan dengan masyarakatnya. Pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan mulai Tanggal 14 Maret 2008, sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dibawah kepemimpinan **Kang Yoto-Kang Hartono**, Keterbukaan pemerintahan yang dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro telah memberikan inspirasi para penulis, salah satunya adalah *Otto Scharmer* dalam buku **Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economics** (by C. Otto Scharmer and Katrin Kaufer, 2013) dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat.

Ditahun 2016 ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal keterbukaan informasi memperoleh beberapa pengakuan dari Lembaga yang peduli KIP baik di tingkat nasional maupun internasional yaitu di awal 2016 Seknas Open Government Indonesia (OGI) mengajukan 3 (tiga) kota, Kota Banda Aceh, DKI Jakarta dan Kabupaten Bojonegoro sebagai pilot project Open Government Indonesia untuk mengikuti kompetisi Open Government di tingkat dunia yang diselenggarakan oleh Open Government Patnership (OGP) yang beranggotakan 75 negara. Di ajang ini Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi percontohan Pemerintahan terbuka/ OGP bersama 14 Negara di dunia antara lain Seoul (Korea Selatan), Paris (Perancis), Buenos aires (Argentina), San Paulo (Brazil), Tbilisi (Goergia), dan lain-lain.

Keterbukaan pemerintahan dalam prosesnya tidak akan pernah berhenti, oleh karena itu, saat ini Pemerintah Bojonegoro memerlukan beberapa rencana aksi menuju pemerintahan terbuka antara lain : melaksanakan revolusi data, open data kontrak, penguatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Desa maupun penetapan berbagai regulasi yang mendukung Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro , kami menyadari dalam Laporan Tahunan yang menggambarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro, masih memerlukan berbagai masukan demi mengapai hal yang lebih baik. Untuk itu mohon dapatnya memberikan masukan yang konstruktif.

Demikian semoga yang disajikan dalam pelaporan ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten Bojonegoro dan daerah lain untuk dapat saling belajar. Sekian terimakasih. SALAM KETERBUKAAN.....

Bojonegoro, 31 Desember 2016  
Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kabupaten Bojonegoro  
Ketua

**KUSNANDAKA TJATUR P.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19670224 198602 1 001



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>iv</b>
<b>Sekilas Bojonegoro .....</b>	<b>1</b>
<b>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bojonegoro .....</b>	<b>1</b>
1. Regulasi Pelayanan Informasi .....	2
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten dan SKPD .....	6
<b>Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....</b>	<b>8</b>
1. Sarana dan Prasarana .....	12
2. Anggaran PPID .....	20
3. Daftar Informasi Publik .....	20
4. Permohonan Informasi Publik .....	22
5. Sengketa Informasi Publik .....	35
<b>Kendala dan Pengembangan .....</b>	<b>36</b>
1. Kendala .....	36
2. Pengembangan/ Inovasi .....	37
3. Rencana Tindak/ Target Tahun 2017 .....	40
<b>Dokumen .....</b>	<b>41 – 48</b>
<b>Dokumen Indek Keterbukaan Desa .....</b>	<b>49</b>
<b>Link Pemberitaan on-line .....</b>	<b>50</b>

**.....Keterbukaan akan membangun Kepercayaan**

**..... Merubah dari Pemerintahan EGO,, ke ECO adalah  
kunci Keterbukaan**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.....	6
Gambar	2	Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Bojonegoro .....	13
Gambar	3	Sarana Penunjang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi PPID KabupatenBojonegoro .....	14
Gambar	4	Desk Layanan PPID SKPD .....	15
Gambar	5	Desk Layanan PPID Dialog Publik .....	16
Gambar	6	Desk Layanan PPID Bulan Layanan Publik .....	16
Gambar	7	SIAP LAPOR!.....	17
Gambar	8	Publikasi Layanan Informasi .....	19
Gambar	9	Kerjasama Layanan Permohonan Informasi .....	19
Gambar	10	Layanan Informasi DIP Pada Web PPID .....	21
Gambar	11	Layanan Informasi DIP Pada Web PPID SKPD .....	22
Gambar	12	Layanan PermohonanInformasiMelalui <b>LAPOR!</b> .....	31
Gambar	13	Laju Tindak Lanjut Permohonan Informasi Melalui <b>LAPOR!</b> .....	32
Gambar	14	Topik Permohonan Informasi dan SKPD Terlapor Melalui <b>LAPOR!</b> .....	33
Gambar	15	Grafik Permohonan Informasi Melalui Radio Malowopati ...	34
Gambar	16	GrafikPermohonanInformasiMelalui Dialog “SoboPendopo” .....	34

Gambar	17	MOU Bupati Bojonegoro dengan CSO Bojonegoro Institute Dan Sinergantara .....	37
Gambar	18	Open Dokumen Kontrak.....	41
Gambar	19	Pelatihan Digitalisasi IT Aplikasi Update Data Dasa Wisma Kader Dasa Wisma .....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel	1	Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Kominfo .....	3
Tabel	2	Data PPID Kabupaten , SKPD dan BUMD .....	8
Tabel	3	Data Layanan Informasi Langsung Melalui Desk Tahun 2016.....	23
Tabel	4	Rincian Pelayanan Informasi pada Desk layanan Permohonan Informasi Tahun 2016 .....	24



# PPID Bojonegoro

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kabupaten Bojonegoro sebagai pengelola kebijakan pelayanan informasi publik, dalam pelaksanaan tugasnya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan informasi publik merupakan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang dikelola oleh Badan Publik.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam implementasinya telah menuangkannya dalam RPJMD maupun Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai SKPD yang mengelola PPID kabupaten. Disamping itu pada seluruh SKPD telah ditetapkan penjabaran regulasinya. Berbagai dasar kebijakan tersebut merupakan pedoman dalam menetapkan strategi pencapaian target keterbukaan informasi publik, baik yang dilakukan oleh setiap SKPD yang tertuang dalam berbagai program kegiatannya maupun yang secara langsung dilaksanakan oleh PPID, yaitu kegiatan untuk mencapai target selama 5 (lima) tahun maupun tahunan yang tertuangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Renja Kerja (Renja) SKPD.

Penjabaran kebijakan pelayanan informasi publik, teruraikan dalam : (1) regulasi pelayanan informasi publik ; (2) PPID Kabupaten dan PPID SKPD.

## 1. Regulasi Pelayanan Informasi Publik

Dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 dengan **VISI** :**“Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan dan Energi Negeri yang Produktif, BerdayaSaing, Adil, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan”**, dimana pada **MISI** yang ke-3: **“ Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang professional ”**, dengan sasaran meningkatnya : **“aksesibilitas bagi warga terhadap informasi pembangunan”**. Adapun indikator terhadap sasaran tersebut yaitu :

- (1) persentase cakupan wilayah untuk pelayanan informasi pembangunan;
- (2) persentase layanan interaksi pengaduan secara online.

Berdasarkan RPJMD tersebut, maka Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro menjabarkan dalam visi: **“ Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik dalam mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal ”**. Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan e-Government dan peningkatan profesionalisme pelayanan Pos dan Telekomunikasi
2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial dan kemitraan profesi.

Pada penjabaran Misi 2 : Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi **Tujuan 1**: Meningkatnya penyebaran informasi, dengan **Indikator** : Meningkatnya cakupan penyebaran informasi, dengan sasaran, sebagai berikut :

Tabel 1

**Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Kominfo**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI keamanan informasi dan sistem informasi terintegrasi	Presentase Peningkatan keamanan Sistem Informasi
		Rasio Jumlah Desa/ Kel yang tercakup infrastruktur jaringan TI
		Presentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi
		Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang terimplementasikan
2	Meningkatkan KIM berbasis IT, eksistensi PPID dan kemitraan profesi	Rasio jumlah informasi dan KIM berbasis IT
		Rasio jumlah lembaga profesi yang bermitra
		Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi
		Rasio tindak lanjut pengaduan melalui dialog publik
		Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan online
		Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo
		Presentasi jumlah desa/kelurahan yang tercover sarana prasarana penyebar luasan informasi

Untuk pencapaian sasaran tersebut di atas, dijabarkan dalam strategi :**“meningkatkan diseminasi informasi secara berkala didukung oleh peningkatan sumber daya komunikasi dan informasi serta peningkatan kuantitas, dan pendayagunaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT”**. Sedangkan kebijakannya adalah Melaksanakan kemitraan publikasi informasi ke berbagai media serta melakukan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan kepada lembaga-lembaga layanan publik

Mengacu pada kebijakan tersebut, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai dengan tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi
- b. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Managemen Informasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Kabupaten Bojonegoro.
- c. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- d. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (TKBP3).
- e. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
- f. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/54/KEP/412.11/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan (PPID) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- g. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/211/KEP/412.11/2014 tentang Tim Perumus Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

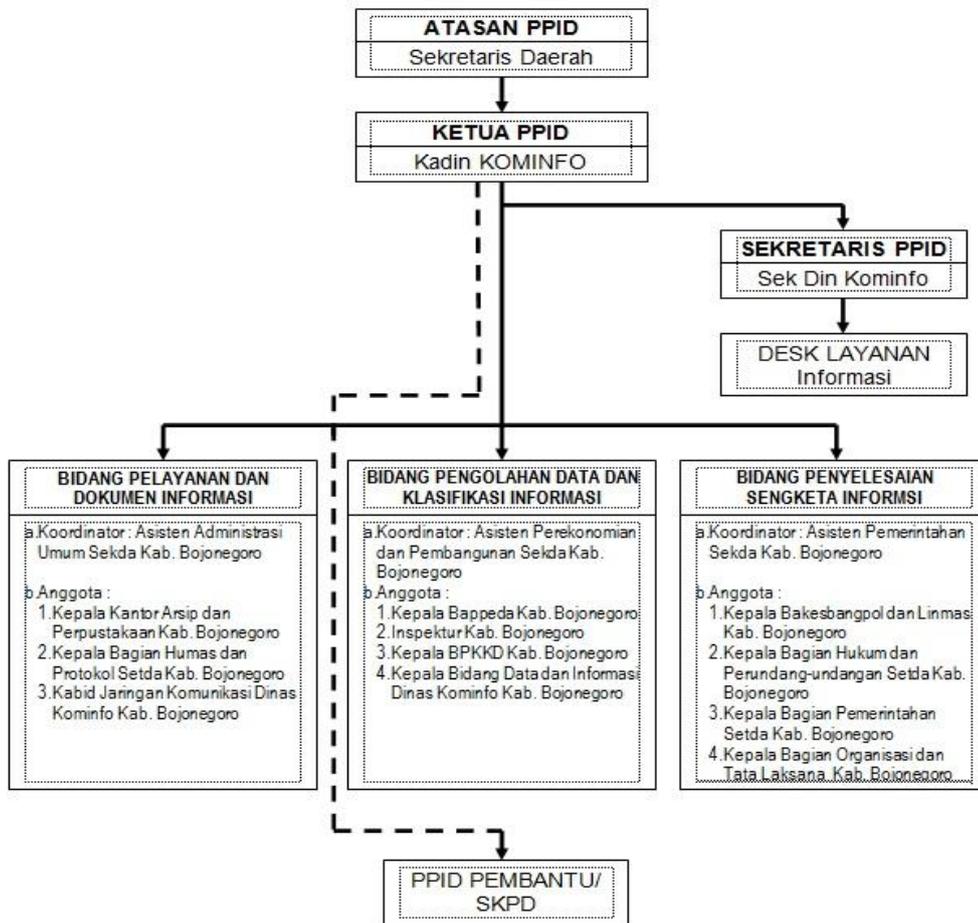
- h. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/397/KEP/412.11/2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan(TKBP3) Daerah.
- i. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/234/KEP/412.11/2015 tentang Tim Transparasi Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi DiKabupaten Bojonegoro Periode 2015 – 2018.
- j. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/247/KEP/412.11/2015 tentang Tim Perumus Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- k. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/132/KEP/412.11/2016 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016
- l. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/037/412.45/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro
- m. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/038/412.45/2015Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Informasi Melalui Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Integrasi Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR, SMS Radio Malowopati, Twitter Bupati dan Media Cetak Serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro
- n. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/068/412.45/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

## **2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, pada Bidang Jaringan Komunikasi Seksi Komunikasi Pemerintah. Penjabaran teknis pengelolaan PPID Kabupaten dan SKPD tertuang dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Untuk PPID Kabupaten menangani informasi dan dokumentasi Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah), Asisten Sekretaris Daerah dan bagian lingkup Sekretariat Daerah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPID SKPD.

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 1  
Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016



Data PPID Kabupaten dan PPID SKPD serta BUMD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah terbentuk PPID, sebagai berikut :

Tabel 2  
Data PPID Kabupaten, SKPD dan BUMD

No.	URAIAN	JUMLAH				PERSONIL	KET.
		PPID	Ada	belum	SK		
1.	PPID Kabupaten	1	1		1	18	
2.	SKPD						
	a. Badan	9	9		9	46	
	b. Dinas	17	17		17	83	
	c. Inspektorat	1	1		1	9	
	d. Sekretariat DPRD	1	1		1	5	
	e. Kantor	3	3		3	16	
	f. Kecamatan	28	28		28	107	
	g. RSUD	3	3		3	18	
	h. BUMD	6		6			
<b>JUMLAH</b>		<b>69</b>	<b>63</b>	<b>6</b>	<b>69</b>	<b>302</b>	

Sumber : Aplikasi Sistem Monitoring (Sismon)

Organisasi PPID SKPD, diketuai oleh Sekretaris untuk lingkup Badan, Dinas, Inspektorat dan Kecamatan, sedangkan untuk Kantor oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, untuk Sekretariat DPRD dan Direktur RSUD oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Masing-masing atasan langsung dari PPID adalah para Kepala SKPD. Struktur organisasi PPID Kabupaten maupun SKPD meliputi Atasan PPID, Ketua PPID, Sekertaris, Bidang Pelayanan dan dokumentasi informasi, bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi dan bidang penyelesaian sengketa informasi.

# ***Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik***

Komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan semua aktivitas, merupakan kekuatan tersendiri, serta menjadikan spirit kerja untuk bersinergitas mencapai target kinerja. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro (Kang Yoto- Kang Hartono), memiliki komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Hal ini telah dibuktikan dengan berbagai mekanisme kemudahan aksesibilitas informasi melalui berbagai media, melalui twitter. WhatsApps, layanan on-line, SMS langsung, SMS Radio Malowopati FM, Forum Radio, dialog interaktif/ dialog publik.

Untuk penguatannya, juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik NGO yang ada di Bojonegoro, antara lain Bojonegoro Institut (BI), Institute Development of Society (IDFoS), Sinergantara, Mediatrac Terkait dengan keterbukaan pengelolaan minyak dan gas bumi bersama Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Bahkan ditahun 2016 ini para pihak telah bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro yaitu :

1. Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI) mendampingi Bojonegoro dalam menentukan dan melaksanakan Rencana Aksi daerah di bidang Pemerintahan terbuka/Open Government, hal ini terkait pula dengan terpilihnya Kabupaten Bojonegoro sebagai kota kecil menjadi percontohan pemerintahan terbuka bersama 14 kota di dunia yang tergabung dalam Open Government Patnership (OGP) yang beranggotakan 75 Negara.

2. TP PKK Kabupaten Bojonegoro bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan Big Data/ Revolusi Data, data Dasa Wisma by name by address yang meliputi 300 indikator mulai pekerjaan, pendidikan, ODF, jumlah tanaman yang dimiliki.
3. Beberapa NGO berskala Nasional dan Internasional bersama pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersinergi dalam penguatan Open Government yakni INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), Mediatrac,dll.
4. Festival Open Government Partnership  
Untuk menguatkan keterbukaan pemerintahan kabupaten bojonegoro baik kepada pusat, regional, maupun masyarakat bojonegoro sendiri, pemerintah Kabupaten Bojonegoro Menyelenggarakan Festival Open Government Partnership (OGP) kegiatan ini dilaksanakan tanggal 19 Oktober 2016 selama dua bulan yang dikemas dalam bentuk showcase transparansi anggaran Seluruh OPD. Festival ini dibuka oleh Bupati Bojonegoro Drs. H. Suyoto M.Si. dihadiri dan di apresiasi langsung oleh Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si selaku Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, NGO Nasional dan Internasional, bussiness man, maupun masyarakat umum;
5. Festival Hak Asasi Manusia 2016  
Festival HAM yang dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, dibuka Mulai Tanggal 30 November 2016 sampai tanggal 02 Desember 2016.Tema Festival Ham kali ini adalah " Merayakan implementasi Pancasila di Tingkat Lokal ". Festival ini dihadiri oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, KetuaKomnas HAM M. Imdadun Rahmat, Bupati Bojonegoro Suyoto, dan Ketua INFID Sugeng Bahagijo. Pada Festival tersebut juga hadir ratusan tamu undangan dan peserta baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Setelah pembukaan, acara tersebut dilanjutkan

dengan diskusi pleno dengan menghadirkan tujuh orang pembicara, yaitu Wakil Ketua Komnas HAM Roichatul Aswidah, Anggota Watimpres Sidarto D, Bupati Bojonegoro Suyoto, Direktur Migrant Care Anis Hidayah, dan Deputi Kantor Staf Presiden Jaleswari P.

6. Apresiasi terhadap keterbukaan pemerintah kabupaten Bojonegoro  
Apa yang telah dicapai pemerintah kabupaten bojonegoro dalam bidang Keterbukaan Pemerintahan mendapat apresiasi dari berbagai pihak baik tingkat nasional maupun internasional, antara lain: Menjadi pilot project Open Government Partneship (OGP), memperoleh award dari PPID Komisi Informasi Jawa timur, maupun diundang menjadi narasumber di berbagai kegiatan internasional dan nasional, dan dijadikan lokus benchmarking. Kegiatan tersebut meliputi,
  - a. **Bupati Bojonegoro Suyoto Menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi LAPOR-SP4N yang digelar Kementerian PANRB, Pada Tanggal 19 Juli 2016 di Jakarta.**
  - b. **Bojonegoro Menjadi Saalah satu Pembicara dalam Event Data for Life 2016 yang digelar oleh Mediatrac pada Tanggal 30 Agustus 2016 di Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta**
  - c. **Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro mewakili Indonesia untuk memberikan testimoni soal percontohan Pemerintahan Terbuka atau Open Government Partnership (OGP) Pada Tanggal 15 sampai 16 September 2016, di Washington DC, Amerika Serikat.**
  - d. **Dinas Kominfo paparkan SIAP LAPOR dalam Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016 Pada Tanggal 26 sampai 27 Oktober 2016di Bandung**
  - e. **Bojonegoro mewakili Indonesia dalam *Global Summit Meeting of the Open Government Partnership (OGP)* KTT OGP Pada Tanggal, 07 Desember 2016di Paris, Perancis.**
  - f. **Bojonegoro menjadi pembicara tunggal di Institute for Development Studies (IDS), University of Sussex, Pada Tanggal 5 Desember 2016 di Inggris.**

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut :

## **1. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana PPID di Kabupaten Bojonegoro, terletak pada 2 (dua) tempat, yaitu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro di Gedung Pemkab Bojonegoro jalan P. Mas Tumapel Nomor 1 Bojonegoro dan pada Desk Layanan Informasi PPID di jalan AKBP M. Suroko Nomor 11 Bojonegoro. Berbagai fasilitas tersebut adalah sebagai berikut :

### **a. Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten**

Layanan PPID Kabupaten, menyatu dengan Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Jl. Mas Tumapel No. 01 Kabupaten Bojonegoro, Layanan PPID Berada di Lantai 1 Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bojonegoro sendiri berada di lantai 3 pada Gedung yang sama, Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan berbagai pihak dalam memohon informasi dan data, Dengan demikian, akan dapat memberikan dukungan langsung terhadap berbagai sinergitas informasi.

Gambar 2  
Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi  
PPID Kabupaten Bojonegoro



Desk layanan informasi PPID Kabupaten dilengkapi dengan ruangan desk layanan informasi PPID Kabupaten berukuran 4x5 meter, dilengkapi dengan fasilitas berupa: set ruang tamu/tunggu, front desk informasi, jaringan wifi gratis, 5 Buah power source untuk laptop atau smartphone 1 (satu) unit Komputer set printer plus scan, display monitor tv 42", papan informasi, almari dan rak buku, booklet, leaflet, buku-buku seputar PPID, papan struktur organisasi, alur permohonan informasi, alur keberatan, poster-poster jam layanan dan jenis layanan, 2 (dua) orang petugas desk layanan informasi dan formulir-formulir hard copy dan digital.

Pada ruang layanan permohonan informasi dan dokumentasi PPID, juga dilengkapi sarana diskusi untuk para pihak. Disamping itu juga diberikan sarana *free wifi* untuk memberikan penguatan layanan berbasis IT. Di sisi lain, apabila terdapat pendengar radio Malowopati FM, yang membutuhkan kejelasan informasi, dapat langsung terkoneksi dengan

layanan PPID. Khusus papan informasi, PPID Bojonegoro memiliki papan informasi di samping di desk layanan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga ada papan informasi di seluruh Kecamatan, di area umum/tempat strategis.

Gambar 3

Sarana Penunjang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi  
PPID Kabupaten Bojonegoro



#### **b. Desk Layanan Informasi PPID SKPD.**

Untuk desk layanan informasi pada SKPD, berada pada masing-masing SKPD dengan sarana prasarana penunjang hampir sama dengan sarana prasaran yang ada di PPID Kabupaten. Antara PPID Kabupaten dan PPID SKPD telah terkoneksi dengan jaringan IT dan tersinergi dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID. Beralamat di masing-masing badan SKPD yang terkoneksi dengan PPID Utama melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID.

Gambar 4  
Desk Layanan PPID SKPD



### c. Desk Layanan Informasi Mobile

Merupakan layanan desk informasi PPID Utama dan SKPD, yang melekat pada kegiatan Dialog Publik setiap Hari Jum'at Pukul 13.00 Wib sampai dengan 15.00 WIB di Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Para pemohon informasi, permohonannya dicatat dan ditanggapi langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah selaku atasan PPID, Ketua PPID Utama dan PPID SKPD.

Gambar 5  
Desk Layanan PPID Dialog Publik



Apabila dalam pelayanan desk mobile ini tidak terselesaikan tuntas, permohonan informasi masyarakat akan terlayani dalam system LAPOR sehingga relative tidak ada permohonan yang tidak terlayani. Desk layanan informasi mobile, juga dilaksanakan melalui penguatan Keterbukaan Informasi Publik dan pelayanan informasi publik pada Bulan Pelayanan Publik, yaitu yang diawali 30 Mei di kecamatan Kepohbaru, Juli – Agustus di Kecamatan Padangan, Malo, Tambakrejo dan Sukosewu. Kegiatan Bulan Pelayanan Publik adalah salah satu inovasi pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Gambar 6  
Desk Layanan PPID Bulan Layanan Publik

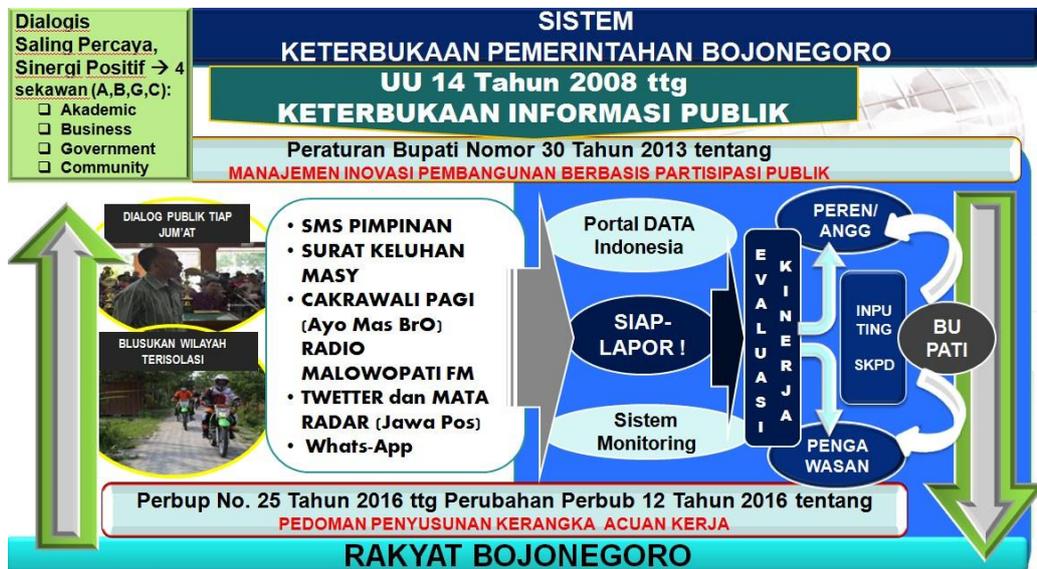


#### d. Desk Layanan Informasi Elektronik

Di era digitalisasi PPID Kabupaten Bojonegoro, juga telah mengembangkan layanan informasi melalui website, baik pada website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (<http://www.bojonegorokab.go.id>) dengan sub domain seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Khusus untuk informasi layanan PPID pada Website PPID Utama <http://ppid.bojonegorokab.go.id/>.

Pada tahun 2015, aplikasi **LAPOR!** telah dikembangkan dan diintegrasikan dengan sarana akses penyampaian informasi yang telah ada dan berkembang di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik. Semua pengaduan yang berbasis non IT, diintegrasikan ke dalam sistim aplikasi **LAPOR!**, yakni Sistem Integrasi Aspirasi Publik - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR).

Gambar 7  
SIAP LAPOR!



Ada beberapa cara untuk penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR!,

- (a) Menggunakan SMS : ketik BJN (spasi), isi laporan, kirim SMS ke 1708, lampirkan data dukung (foto, dan lain-lain)
- (b) Menggunakan twitter : login via twetter di [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) , sampaikan laporan di twitter dengan format #LAPOR BJN (spasi), isi laporan, mention @pembkab.bjn
- (c) Menggunakan SMS ke Halo Bupati nomor : 08113445999

Sarana penyampaian pengaduan melalui aplikasi **LAPOR!** telah dipublikasikan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, baliho, umbul-umbul, banner dan lain-lain.

Hal-hal yang diintegrasikan adalah, semua pengaduan pada whatsApps, pimpinan SKPD, pengaduan pada Radio Malowopati FM nomor Hp : 08113322958, pengaduan melalui twitter, pengaduan melalui group whatsApps : kerja cepat tepat manfaat, monitoring keuangan dan pembangunan, sapa keluarga dengan kasih (sagasih), layanan beras keluarga miskin (raslakin), berita jonegoro. Prinsip yang diatur pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013, bahwa semua pengaduan dari masyarakat melalui berbagai saluran informasi, diolah dan diidentifikasi dan dijadikan input dalam perencanaan sekaligus dipilah dan dijadikan ide dalam pembangunan. Salah satunya adalah ide pembangunan jalan dengan paving.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga melakukan kerjasama dengan berita harian Jawa Pos Radar Bojonegoro, yakni terkait dengan berbagai pengaduan, keluhan baik yang langsung dari pembaca melalui twitter Radar Bojonegoro maupun dari wartawan Radar Bojonegoro. Berbagai keluhan, pengaduan tersebut diidentifikasi menjadi bagian permohonan informasi yang diteruskan kepada SKPD terkait. Demikian pula untuk kolom **Mata Radar**, yakni hasil “ jepretan dari para jurnalis Radar Bojonegoro ” terhadap kondisi sarana prasana umum yang kurang dan tidak layak.

Gambar 8  
Publikasi Layanan Informasi



Gambar 9  
Kerjasama Layanan Permohonan Informasi



## 2. Anggaran PPID

Anggaran pelayanan informasi dan kegiatan PPID Kabupaten setiap tahunnya telah dianggarkan, pada penganggaran di Seksi Komunikasi Pemerintah Bidang Jaringan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika, yang pada tahun 2016 sebesar Rp. 301.981.500,- setelah perubahan PAPBD sebesar Rp. 252.285.000,- sebagai berikut :

### 1. Program kerjasama informasi dengan media massa

- Penyebarluasan informasi melalui media massa sebesar Rp. 134.172.000,- setelah PAPBD sebesar Rp.151.350.000,-

### 2. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

- a. Kegiatan : pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, sebesar : Rp. 48.722.000,- , setelah PAPBD sebesar Rp. 30.375.000,-
- b. Kegiatan : pengumpulan data dan informasi daerah, sebesar : Rp.119.087.500,- setelah perubahan PAPBD sebesar Rp.70.560.000,-

### 3. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Untuk PPID SKPD, penganggarnya diikutkan di Sekretariat masing-masing SKPD yakni pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Sedangkan sebagian sudah memberikan honor pada pengelola PPID SKPD.

## 3. Daftar Informasi Publik (DIP)

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro PPID Kabupaten maupun PPID SKPD/ Pembantu telah

melakukan pemuktahiran data dan mengupload Daftar Informasi Publik (DIP) di website masing-masing Badan Publik. Sampai dengan tahun 2016 DIP yang sudah diupload PPID Kabupaten sejumlah 557 DIP sedangkan dari 68 SKPD yang telah mengupload DIP sejumlah 34 SKPD. Jumlah DIP yang di Upload di website SKPD sebanyak 518 DIP. Dengan demikian jumlah DIP pada PPID Kab Bojonegoro sebanyak : 1075 DIP,

Gambar 10  
Layanan Informasi DIP pada Web PPID

Home • Daftar Informasi Publik Bojonegoro

Show 10 entries Search: 2016

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Secara Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan	Download
	Rencana Kegiatan Aksi 2016	Berisi tentang Rencana Kegiatan Aksi (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bojonegoro	BPKKD, PPID	2016	Softcopy	Berkala				5 Tahun	<a href="#">Lihat</a>
	Alokasi Dana Desa 2016	Berisi tentang Alokasi Dana Desa Seluruh Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016	BPKKD, PPID	2016	Softcopy	Berkala				5 Tahun	<a href="#">Lihat</a>
	Rancangan Perda Tentang APBD 2016	Berisi tentang Ringkasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Bojonegoro	BPKKD, PPID	2016	Softcopy	Berkala				5 Tahun	<a href="#">Lihat</a>
	Perda Tentang APBD 2016	Berisi tentang Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Bojonegoro	BPKKD, PPID	2016	Softcopy	Berkala				5 Tahun	<a href="#">Lihat</a>
	RKPD Kabupaten Bojonegoro 2016	Berisi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016		2015	Softcopy	Berkala				5 Tahun	<a href="#">Lihat</a>
	Keputusan Bupati Bojonegoro No. 137 Tahun 2015	Berisi Keputusan Bupati No. 137 Tahun 2015 Tentang Tim Teknis Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016	Bagian Hukum dan PPID	2015	Softcopy		Setiap Saat			5 Tahun	<a href="#">Lihat</a>

Gambar 11  
Layanan Informasi DIP Pada Web PPID SKPD

No	Kode	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia
1	bjn041.01	Kedudukan domisili dan alamat lengkap	Kedudukan domisili dan alamat lengkap Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro ( Terdiri dari : Alamat, Nomor Fax/Tlp. dan E-mail )	Sekretaris	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Softcopy, hardcopy dan website
2	bjn041.02	Visi dan Misi	Berisi tentang Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Softcopy, hardcopy dan website
3	bjn041.03	Tupoksi	Berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Softcopy, hardcopy dan website
4	bjn041.04	Struktur Organisasi	Berisi Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Softcopy, hardcopy dan website
5	bjn041.05	Gambaran umum satuan kerja	Berisi gambaran umum tentang Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan tugas dan fungsi serta kedudukan dalam Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.	Sekretaris	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Softcopy, hardcopy dan website
6	bjn041.06	Profil singkat pejabat struktural	Berisi tentang gambaran umum secara singkat pejabat pejabat struktural di Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang berisi tentang Nama, Nomor Tlp. / HP Alamat Rumah, Pendidikan dan Penghargaan yang pernah diterima	Sekretaris	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Softcopy, hardcopy dan website
7	bjn041.07	Perencanaan Kinerja Tahun 2014	Berisi tentang Perencanaan Kinerja Melalui Sasaran dan Indikator Program di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Softcopy, hardcopy dan website

**DIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan**

#### 4. Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi di PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dari berbagai akses informasi di atas adalah sebanyak 3.732 permohonan, sedangkan dokumen yang dimohon oleh pemohon informasi publik melalui desk PPID diantaranya berupa KAK dan Dokumen Kontrak (LPSE), KUA PPAS 2015, RAPBD 2016, Perbub Penjabaran APBD 2016, Laporan Realisasi APBD 2016, Register SP2D, dan lain-lain.

Selama tahun 2016 ini, informasi yang paling banyak dimohon melalui saluran layanan informasi desk PPID dan juga melalui saluran layanan SMS Radio Malowopati serta layanan on-line, adalah mengenai pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk saluran layanan desk informasi mobile (dialog publik Jum'at) adalah seputar pemerintahan.

Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3

Data Layanan Informasi Langsung Melalui Desk Tahun 2016

Bulan	Jml Permo honan	Pelayanan (hari)	Dikabulkan		Dito lak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Penuh	Seba gian		Dikecu alikan	Belum Dikuasai	Lain nya
1	2	+10	2	0	0	0	0	0
2	5	5	5	0	0	0	0	0
3	5	+10	5	0	0	0	0	0
4	1	4	1	0	0	0	0	0
5	1	1	1	0	0	0	0	0
6	1	1	1	0	0	0	0	0
7	2	3	2	0	0	0	0	0
8	1	1	1	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2	3	2	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	9	5	9	0	0	0	0	0
<b>JML</b>	<b>29</b>		<b>13</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa seluruh permohonan informasi berjumlah 29 (dua puluh sembilan) atau 100%, dikabulkan sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan informasi dan dokumentasi di Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten Bojonegoro dapat terlayani semua.

Secara rinci permohonan informasi melalui desk layanan permohonan informasi, adalah sebagai berikut :

Tabel 4  
Rincian Pelayanan Informasi pada Desk layanan Permohonan Informasi  
Tahun 2016

No Register	Pemohon	Isi Permohonan	Kegunaan	Status	Keterangan
01/I/PPID/BJN/2016	Siti Hawa	KAK dan Dokumen Kontrak tahun 2015 (LPSE) 20 Kegiatan	Kontrol Sosial	Ditolak	
				Dokumentasi Informasi belum terdokumen dan/atau belum di periksa BPK	
02/I/PPID/BJN/2016	Sukadi	KAK dan Dokumen Kontrak tahun 2014 (LPSE) 14 Kegiatan	Kontrol Sosial	Terpenuhi 5 Dokumen	Hasil mediasi 9 dok Kontrak dipenuhi
03/II/PPID/BJN/2016	Imam Muchibul Ma'aruf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KUA PPAS 2015</li> <li>• RAPBD 2016</li> <li>• Perbub Penjabaran APBD 2016</li> <li>• Laporan Realisasi Semester 1 APBD 2014</li> </ul>	Pengkayan data dan bahan diskusi	Terpenuhi	
04/II/PPID/BJN/2016	Imam Sugianto	Data Dinas PU Swakelola 2015	Pembelajaran	Ditolak, belum terdokumentasikan	Disarankan langsung ke PPID Dinas PU
05/II/PPID/BJN/2016	Link Kontrol	Register SP2D semua pengeluaran BPKKD	Studi Banding	Terpenuhi	
06/II/PPID/BJN/2016	Imam Muchibul Ma'aruf	SK PPID SKPD Dinas Kesehatan	Pengkayaan Data	Terpenuhi	
07/II/PPID/BJN/2016	AW. Syaiful Huda	Perda no 4 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan	Kajian Kebijakan dan Pengkayaan Data	Terpenuhi	
08/III/PPID/BJN/2016	Zulfian Ali Rohman	Perijinan LPP Malowopati	Adobsi Ijin	Terpenuhi	

09/III/PPID/BJ N/2016	Siti Hawa	KAK dan Dokumen Kontrak	Kontrol Sosial	Ditolak, Belum terdokumentasikan di PPID Utama	Sengketa Informasi
10/III/PPID/BJ N/2016	Sukadi	KAK dan Dokumen Kontrak	Kontrol Sosial	Ditolak, Belum terdokumentasikan di PPID Utama	Sengketa Informasi
11/III/PPID/BJ N/2016	Siti Hawa	KAK dan Dokumen Kontrak	Kontrol Sosial	Ditolak, Belum terdokumentasikan di PPID Utama	Sengketa Informasi
12/III/PPID/BJ N/2016	Sukadi	KAK dan Dokumen Kontrak	Kontrol Sosial	Ditolak, Belum terdokumentasikan di PPID Utama	Sengketa Informasi
13/IV/PPID/BJ N/2016	IDFOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Wilayah Terisolir</li> <li>• Demografi Bojonegoro</li> <li>• Data Kemiskinan</li> <li>• Anak Usia Sekolah</li> <li>• Usia Produktif</li> <li>• Marginal</li> </ul>		Terpenuhi sebagian besar	Kurang 1 dokumen
14/V/PPID/BJ N/2016	Trismayanti Yuliandani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Penduduk 5 Tahun terakhir</li> <li>• Data Pendidikan</li> <li>• Data Ketenagakerjaan</li> <li>• Pendapatan Penduduk</li> <li>• Data Kesehatan</li> <li>• Struktur Politik</li> </ul>	Memenuhi tugas Skripsi di Universitas Airlangga Jurusan Ilmu Politik	Terpenuhi	
15/VI/PPID/BJ N/2016	Beny Kurniawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pengelolaan Kehumasan</li> <li>• Laporan Tahunan PPID</li> </ul>	Perbandingan SOP	Terpenuhi	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji Konsekuensi</li> <li>• SOP</li> </ul>			
16/VII/PPID/B JN/2016	Imadudin	Struktur Organisasi dan Tupoksi Kominfo	Bahan studi pembuatan Kominfo di Kab. Tuban	Terpenuhi	
17/VII/PPID/B JN/2016	Ladiatno Samsara	Data tentang open goverment di Kabupaten Bojonegoro	Sebagai dokumentasi kegiatan inovasi daerah. ini akan memperkaya database inovasi daerah di kedepatian Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara	Terpenuhi	
18/VIII/PPID/B JN/2016	Sukadi	Salinan data perijinan Malowopati FM atau Data Perijinan Radio Swasta	Sebagai contoh dan acuan untuk pendirian radio di Bojonegoro	Terpenuhi	
19/X/PPID/BJ N/2016	Eko Supriyono	SOTK, Regulasi, DPA Dinas Kominfo	Bahan Study Banding Pemkab Lumajang	Terpenuhi	
20/X/PPID/BJ N/2016	Zahrina Arum Nabilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Perkembangan Wisata</li> <li>• Rencana Pengembangan Wisata</li> <li>• 3. Community Relation</li> </ul>	Untuk melengkapi data skripsi Bidang Ilmu Komunikasi Universitas Air Langga	Terpenuhi	
21/XII/PPID/B JN/2016	Pemantau Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekapitulasi Anggaran dan Biaya Desa</li> <li>• Laporan Pertanggung Jawaban</li> </ul>	Kontrol Sosial dan/atau Pengawasan	Dijawab dengan surat kepada pemohon untuk datang langsung ke	Mengingat dokumentasi dan informasi yang

	Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gambar Pekerjaan Fisik</li> <li>•Spesifikasi Pekerjaan Fisik</li> <li>•Daftar Kuantitas dan Harga</li> <li>•Kwitansi Belanja Barang pada Pengadaan Barang</li> <li>•Daftar Penerima barang pada Progam Bantuan Kepada Masyarakat</li> <li>•Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pada Progam Kegiatan</li> </ul> <p>Di desa-desa pada Kecamatan Kapas, Dander, Balen, Trucuk, Bojonegoro, Kalitidu, Sukosewu, Sumberrejo, Ngasem, Purwosari</p>	Publik	PPID OPD.	dimohon begitu banyak dan Pemohon tidak datang langsung ke desk layanan.
22/XII/PPID/B JN/2016	Pemantau Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•RKAS BOS-K2</li> <li>•Laporan Penggunaan Dana BOS</li> <li>•Buku Pembantu Pajak BOS</li> <li>•Daftar Pembelian Barang Inventaris</li> <li>•LPJ Dana BOS Tahun 2014-2015 pada SD dan SMP di wilayah kec. Kapas, Dander, Balen, Trucuk, Bojonegoro, Kalitidu, Sukosewu, Sumberrejo, Ngasem, Purwosari</li> </ul>	Kontrol sosial terhadap pelaksanaan dan/atau Penyelenggaraan Progam Dana BOS Tahun Anggaran 2014 dan 2015	Dijawab dengan surat kepada pemohon untuk datang langsung ke PPID OPD.	Mengingat dokumentasi dan informasi yang dimohon begitu banyak dan Pemohon tidak datang langsung ke desk layanan.
23/XII/PPID/B JN/2016	Pemantau Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kerangka Acuan Kerja (KAK)</li> <li>•Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>•Rencana Anggaran Biaya (RAB)</li> <li>•Spesifikasi Pekerjaan</li> <li>•Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan</li> <li>•Gambar-gambar</li> <li>•Daftar Kualitas dan Harga</li> <li>•Bill Of Quantity (BQ)</li> </ul>	Kontrol Sosial dan Sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan Peran serta membrantas Tindak Pidana Korupsi Seperti	Dijawab dengan surat kepada pemohon untuk datang langsung ke PPID OPD.	Mengingat dokumentasi dan informasi yang dimohon begitu banyak dan Pemohon tidak datang langsung ke desk layanan.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Daftar Penerima Barang</li> <li>•Dokumen Kontrak Lainnya</li> </ul> <p>Pada Kegiatan / Paket Pengadaan SKPD Dinas ESDM dan Dinas Peternakan Tahun 2015</p> <p>(7 DOKumen)</p>	yang di amanatkan dalam PP 71 Tahun 2000		
24/XII/PPID/B JN/2016	Pemantau Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kerangka Acuan Kerja (KAK)</li> <li>•Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>•Rencana Anggaran Biaya (RAB)</li> <li>•Spesifikasi Pekerjaan</li> <li>•Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan</li> <li>•Gambar-gambar</li> <li>•Daftar Kualitas dan Harga</li> <li>•Bill Of Quantity (BQ)</li> <li>•Daftar Penerima Barang</li> <li>•Dokumen Kontrak Lainnya</li> </ul> <p>Pada Kegiatan / Paket Pengadaan SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2015</p> <p>(10 Dokumen)</p>	Kontrol Sosial dan Sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan Peran serta membrantas Tindak Pidana Korupsi Seperti yang di amanatkan dalam PP 71 Tahun 2000	Dijawab dengan surat kepada pemohon untuk datang langsung ke PPID OPD.	Mengingat dokumentasi dan informasi yang dimohon begitu banyak dan Pemohon tidak datang langsung ke desk layanan.
25/XII/PPID/B JN/2016	Pemantau Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kerangka Acuan Kerja (KAK)</li> <li>•Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>•Rencana Anggaran Biaya (RAB)</li> <li>•Spesifikasi Pekerjaan</li> <li>•Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan</li> <li>•Gambar-gambar</li> <li>•Daftar Kualitas dan Harga</li> <li>•Bill Of Quantity (BQ)</li> <li>•Daftar Penerima Barang</li> <li>•Dokumen Kontrak Lainnya</li> </ul>	Kontrol Sosial dan Sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan Peran serta membrantas Tindak Pidana Korupsi Seperti yang di amanatkan dalam	Dijawab dengan surat kepada pemohon untuk datang langsung ke PPID OPD.	Mengingat dokumentasi dan informasi yang dimohon begitu banyak dan Pemohon tidak datang langsung ke desk layanan.

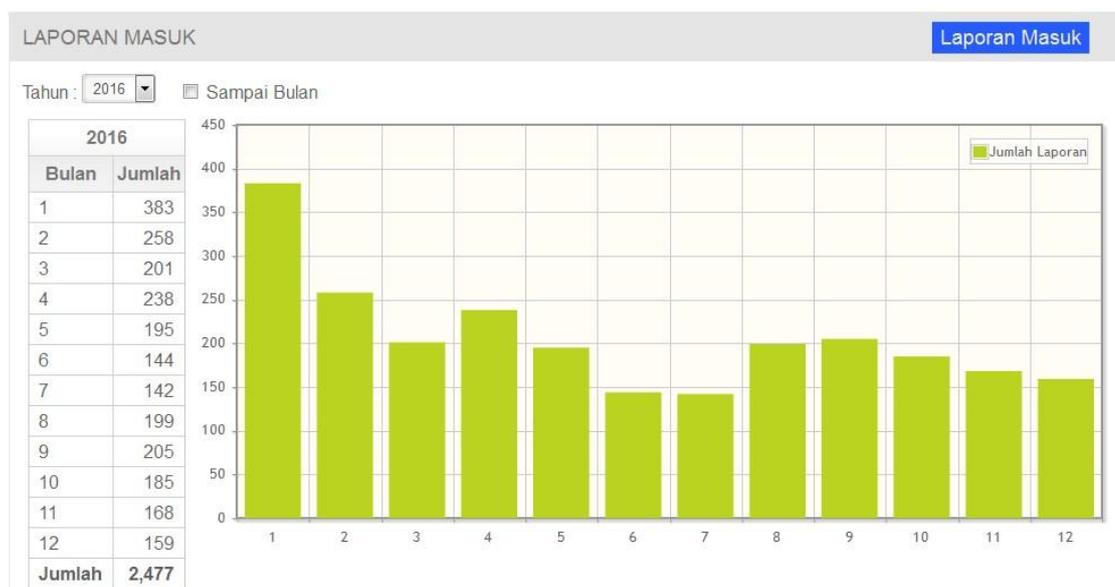
		Pada Kegiatan / Paket Pengadaan SKPD Dinas Pengairan Tahun 2015  (8 dokumen)	PP 71 Tahun 2000		
26/XII/PPID/B JN/2016	Pemantau Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kerangka Acuan Kerja (KAK)</li> <li>•Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>•Rencana Anggaran Biaya (RAB)</li> <li>•Spesifikasi Pekerjaan</li> <li>•Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan</li> <li>•Gambar-gambar</li> <li>•Daftar Kualitas dan Harga</li> <li>•Bill Of Quantity (BQ)</li> <li>•Daftar Penerima Barang</li> <li>•Dokumen Kontrak Lainnya</li> </ul> <p>Pada Kegiatan / Paket Pengadaan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015  (12 dokumen)</p>	Kontrol Sosial dan Sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan Peran serta membrantas Tindak Pidana Korupsi Seperti yang di amanatkan dalam PP 71 Tahun 2000	Dijawab dengan surat kepada pemohon untuk datang langsung ke PPID OPD.	Mengingat dokumentasi dan informasi yang dimohon begitu banyak dan Pemohon tidak datang langsung ke desk layanan.
27/XII/PPID/B JN/2016	Pemantau Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kerangka Acuan Kerja (KAK)</li> <li>•Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>•Rencana Anggaran Biaya (RAB)</li> <li>•Spesifikasi Pekerjaan</li> <li>•Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan</li> <li>•Gambar-gambar</li> <li>•Daftar Kualitas dan Harga</li> <li>•Bill Of Quantity (BQ)</li> <li>•Daftar Penerima Barang</li> <li>•Dokumen Kontrak Lainnya</li> </ul> <p>Pada Kegiatan / Paket Pengadaan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015</p>	Kontrol Sosial dan Sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan Peran serta membrantas Tindak Pidana Korupsi Seperti yang di amanatkan dalam PP 71 Tahun 2000	Dijawab dengan surat kepada pemohon untuk datang langsung ke PPID OPD.	Mengingat dokumentasi dan informasi yang dimohon begitu banyak dan Pemohon tidak datang langsung ke desk layanan.

		(15 dokumen)			
28/XII/PPID/B JN/2016	Pemantau Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kerangka Acuan Kerja (KAK)</li> <li>•Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>•Rencana Anggaran Biaya (RAB)</li> <li>•Spesifikasi Pekerjaan</li> <li>•Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan</li> <li>•Gambar-gambar</li> <li>•Daftar Kualitas dan Harga</li> <li>•Bill Of Quantity (BQ)</li> <li>•Daftar Penerima Barang</li> <li>•Dokumen Kontrak Lainnya</li> </ul> <p>Pada Kegiatan / Paket Pengadaan SKPD Dinas Pertanian Tahun 2015</p> <p>(9 dokumen)</p>	Kontrol Sosial dan Sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan Peran serta membrantas Tindak Pidana Korupsi Seperti yang di amanatkan dalam PP 71 Tahun 2000	Dijawab dengan surat kepada pemohon untuk datang langsung ke PPID OPD.	Mengingat dokumentasi dan informasi yang dimohon begitu banyak dan Pemohon tidak datang langsung ke desk layanan.
29/XII/PPID/B JN/2016	Pemantau Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kerangka Acuan Kerja (KAK)</li> <li>•Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>•Rencana Anggaran Biaya (RAB)</li> <li>•Spesifikasi Pekerjaan</li> <li>•Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan</li> <li>•Gambar-gambar</li> <li>•Daftar Kualitas dan Harga</li> <li>•Bill Of Quantity (BQ)</li> <li>•Daftar Penerima Barang</li> <li>•Dokumen Kontrak Lainnya pada Kegiatan / Paket Pengadaan SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2015</li> </ul> <p>(9 dokumen)</p>	Kontrol Sosial dan Sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan Peran serta membrantas Tindak Pidana Korupsi Seperti yang di amanatkan dalam PP 71 Tahun 2000	Dijawab dengan surat kepada pemohon untuk datang langsung ke PPID OPD.	Mengingat dokumentasi dan informasi yang dimohon begitu banyak dan Pemohon tidak datang langsung ke desk layanan.

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa pemohon informasi melalui desk layanan informasi dari 29 pemohon informasi, yang berasal dari NGO sebanyak 13 (tiga belas) atau 44% sedangkan 16 (enam belas ) atau 56% pemohon informasi berasal dari perseorangan / individu dan dapat disimpulkan dokumen yang dimohon lebih dari 70% dipergunakan untuk kontrol sosial, pengkayaan data 20% dan 10% untuk bahan pembelajaran.

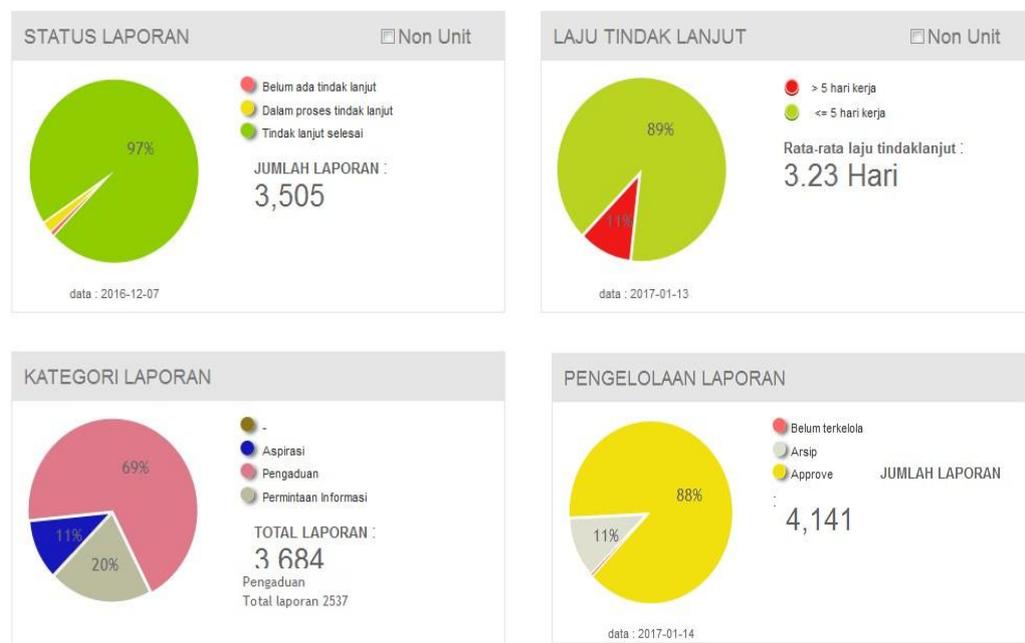
Selanjutnya terkait dengan permohonan informasi melalui aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat (**LAPOR!**) pada tahun 2016 sebanyak 2.477 permohonan. Permohonan tersebut semuanya dikabulkan atau ditindak lanjuti oleh SKPD yang membidangi, sebagaimana data statistik dari aplikasi **LAPOR!**, sebagai berikut:

Gambar 12  
Layanan Permohonan Informasi Melalui **LAPOR!**



Rata-rata laju tindak lanjut terhadap berbagai permohonan informasi dari Admin Kabupaten ke SKPD adalah 3,40 hari kerja. Sedangkan tindak lanjut dari SKPD, rata-rata adalah 3,23 hari kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa tindak lanjut layanan permohonan informasi telah memenuhi standar sistem dan ketentuan. Implementasi sistem aplikasi ini dipergunakan untuk evaluasi SKPD terhadap kecepatan respon publik, yang setiap hari Jum'at dilaporkan oleh Ketua PPID kepada Bupati yang dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD dalam Rapat Evaluasi Kinerja.

Gambar 13  
Laju Tindak Lanjut Permohonan Informasi Melalui LAPOR!



Topik Layanan informasi melalui LAPOR! di tahun 2016 yang dimohon meliputi : Infrastruktur 20 %, Reformasi birokrasi 8%, Pendidikan 5%, Perhubungan 6% sedangkan sisanya 61% adalah topik lainnya dan topik terkait Lingkungan hidup, kesehatan, kesra, pertanian, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lain-lain

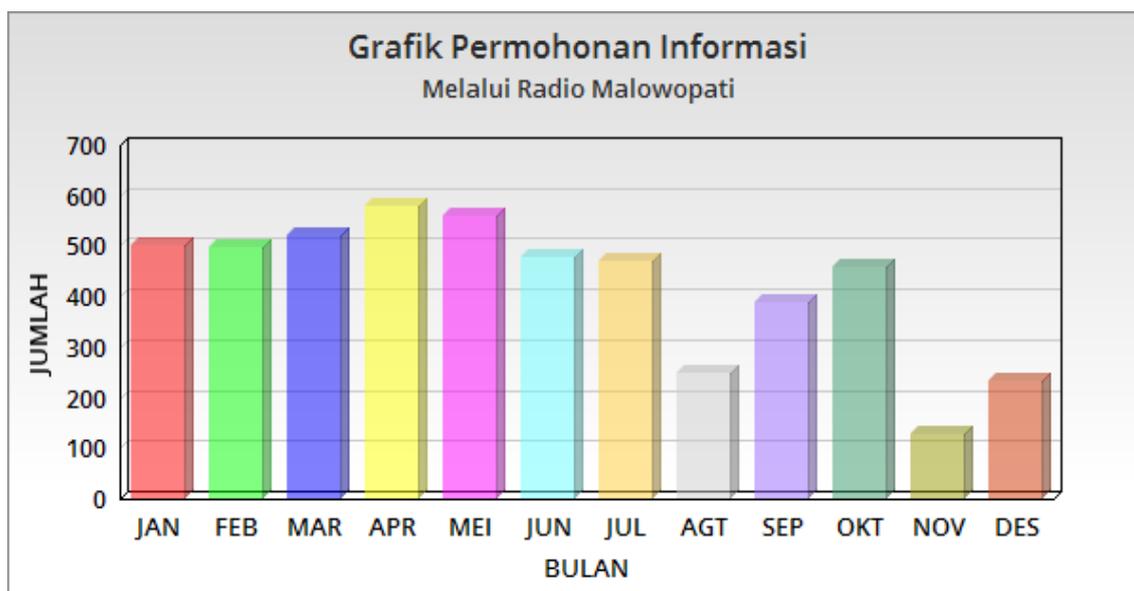
Gambar 14  
 Topik Permohonan Informasi, dan SKPD Terlapor Melalui LAPOR!



Permohonan informasi melalui Radio Malowopati FM pada tahun 2016 sebanyak 3569 pemohon informasi, yang semuanya telah diberikan jawaban dan ditindaklanjuti secara penuh. Untuk memberikan pencerahan dan pemberdayaan kepada masyarakat, telah dikembangkan acara Ayo Mas Bro (Ayo Masyarakat Bojonegoro Produktif) mulai pukul 08.00-09.30, dimana secara bergiliran Kepala SKPD menyampaikan program dan informasi yang dikelola oleh SKPD secara on-air kepada masyarakat. Masyarakat Bojonegoro/pendengar radio Malowopati diberikan keleluasaan untuk mengajukan permohonan informasi terhadap SKPD narasumber, dengan menghubungi on-line nomor HP : 08113322958.

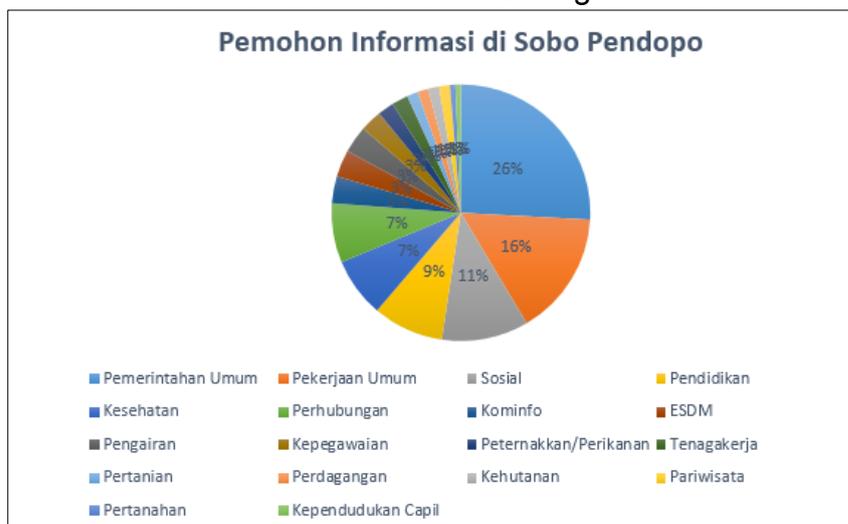
Topik layanan informasi melalui SMS Radio Malowopati yang paling banyak dimohon : tentang pemerintahan 45%, pelayanan publik 20%, kesehatan 15%, pendidikan 5%, ketenagakerjaan 5%, lain-lain 10%

Gambar 15



Desk layanan informasi melalui Dialog interatif/ Dialog Publik Jum'at, pada tahun 2016 sebanyak 166 permohonan informasi yang semuanya telah dijawab dan ditindaklanjuti. Topik layanan informasi pada Dialog Publik "Sobo Pendopo" tahun 2016 adalah : Pemerintahan 26%, Pekerjaan Umum 16%, Sosial 11%, Pendidikan 9%, Kesehatan 7%, Perhubungan 7%, dan 24% lain-lain meliputi sektor Kominfo, ESDM, Pengairan, Kepegawaian, Peternakkan/Perikanan, Tenagakerja, Pertanian, Perdagangan, Kehutanan, Pariwisata, Pertanahan, Kependudukan Capil.

Gambar 16  
Grafik Permohonan Informasi Melalui Dialog Publik "Sobo Pendopo"



Pelaksanaan dialog publik yang dilakukan mulai tanggal 14 Maret 2008 hingga sekarang, disiarkan secara on-air pada Radio Malowopati 95,8 FM dan Radio Madani 125,5 FM. Pada tahun 2016, pelaksanaan dialog publik juga telah dikembangkan dengan streaming pada youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=h90mo39XaH0> (edisi 27 Mei 2016)

#### **4. Sengketa Informasi Publik**

Sampai dengan semester 1 tahun 2016 seluruh pemohon informasi baik secara langsung, online maupun melalui saluran lain telah terlayani secara maksimal, namun ada beberapa permohonan informasi yang terlambat terlayani mengingat dokumen belum terdokumentasikan di PPID Utama sehingga ada kelambatan layanan dan menyebabkan pemohon informasi tidak puas dan mengajukan keberatan yang pada akhirnya terjadi sengketa informasi.

Sengketa informasi tersebut dari 2 (dua) pemohon informasi yakni saudara Sukadi di Semester 1 memohon 14 dokumentasi kegiatan dan Siti Hawa memohon 20 dokumen kontrak kegiatan. Dalam hal ini sengketa informasi saudara Sukadi telah selesai dengan mediasi, PPID Bojonegoro memberikan 5 dokumen kontrak secara langsung sedangkan sisanya pemohon oleh PPID di fasilitasi dalam memperoleh dokumen yang dimohon kepada PPID SKPD, sedangkan untuk permohonan Siti Hawa di tolak oleh Komisi Informasi mengingat dokumen yang di mohon belum selesai di audit oleh BPK.

Di semester ke II tahun 2016 kedua pemohon tersebut memohon lagi 50 dokumen kontrak kegiatan yang dalam proses sengketa informasi memakai mediasi kemudian diputuskan dengan Keputusan Komisi Informasi bahwa termohon memenuhi sebagian dari 30 dokumentasi dan informasi yang dimohon untuk dapat dilihat, dibaca tidak boleh disalin dan didokumentasikan/foto dan 20 dokumentasi dan informasi tersebut harus dipenuhi dengan dapat dilihat, dibaca dan disalin oleh pemohon.

# ***Kendala dan Pengembangan***

Kendala dalam setiap pelaksanaan kegiatan, bukan merupakan hal yang diharapkan, tetapi merupakan hal yang harus tetap diperhatikan. Bercermin dari kendala dan kelemahan, dapat dijadikan kekuatan dan peluang. Oleh karena itu, pada uraian ini, berbagai kendala dan kelemahan dijadikan dasar untuk pengembangan dan inovasi.

## **1. Kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Bojonegoro, antara lain :

- a. Terbatasnya personil yang kompeten terkait Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Belum seluruh SKPD/ Badan Publik komitmen terhadap keterbukaan informasi publik;
- c. Belum semua SKPD/ Badan Publik, tersedia desk layanan informasi;
- d. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- e. Belum optimalnya pengelolaan informasi berbasis IT serta terbatasnya personil yang berkompenten di bidang IT;
- f. Masih belum terpahamkannya hak dan kewajiban publik terhadap keterbukaan informasi, sehingga masih adanya persepsi pemanfaat informasi belum sesuai dengan ketentuan bagi para pemohon;
- g. Adanya permohonan informasi yang tidak serius dan belum memahami SOP pelayanan permohonan informasi;

## 2. Pengembangan/ Inovasi

Dalam upaya penguatan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, PPID Bojonegoro telah melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa stakeholder/mitra profesi, antara lain:

- a. Media cetak Radar Bojonegoro, yakni terkait berbagai informasi masyarakat yang menjadi headline pemberitaan sekaligus permohonan informasi melalui “twitter” dan “mata radar” dalam mekanisme keterbukaan informasi publik.
- b. CSO Bojonegoro Institute, Sinergantara dan Mediatrack, yakni Nota Kerjasama kesepahaman antara Bupati Bojonegoro dengan CSO Bojonegoro Institute, Sinergantara, Mediatrack tentang pengembangan dan implementasi inisiatif Revolusi Data dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pendataan pembangunan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 17

MOU Bupati Bojonegoro dengan CSO Bojonegoro Institute dan Sinegantara



- c. Forum Radio Bojonegoro (12 Radio) tentang akses saluran informasi masyarakat melalui media radio. Para pengelola radio yang tergabung dalam Forum Radio Bojonegoro, diberikan keleluasaan untuk menghimpun berbagai aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan/ mengemas penyampaian aspirasi tersebut sesuai style dari radio masing-masing,
- d. Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT, yaitu dengan masing-masing KIM membuat blog. Melalui blog KIM tersebut dapat dipublikasikan berbagai potensi dan kegiatan pemerintahan desa termasuk publikasi pemanfaatan dan penggunaan anggaran desa. Hingga saat sekarang telah terbentuk sejumlah 68 blog KIM.
- e. Rintisan PPID Desa, dalam upaya mewujudkan Sistem Layanan Informasi Desa (SLID) PPID Bojonegoro melalui pembangunan web desa (webdes) dengan domain desa (nama desa.id), salah satunya adalah desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo <http://pejambon-bjn.desa.id/transparansi-desa/>. Di tahun 2016 terbangun 68 web desa, untuk tahun 2017 target kami memfasilitasi indek keterbukaan desa aktivasi web desa sebanyak 70% dari 419 desa Se-Kabupaten Bojonegoro..
- f. Instruksi Bupati Bojonegoro tentang keterbukaan informasi Pemerintahan desa yang pada prinsipnya berisi mewajibkan Kepala Desa mengumumkan perencanaan dan kegiatan dalam bentuk banner, spanduk berisibesaran anggaran di desa, kegunaan anggaran, lokasi dan penanggungjawabnya serta rencana anggaran dan kegunaannya untuk tahun berikutnya, Memberikan contact person apabila ada saran, usulan dan pertanyaan dari masyarakat  
<http://ppid.bojonegorokab.go.id/instruksi-bupati-bojonegoro-dalam-rangka-pelaksanaan-ogp/>

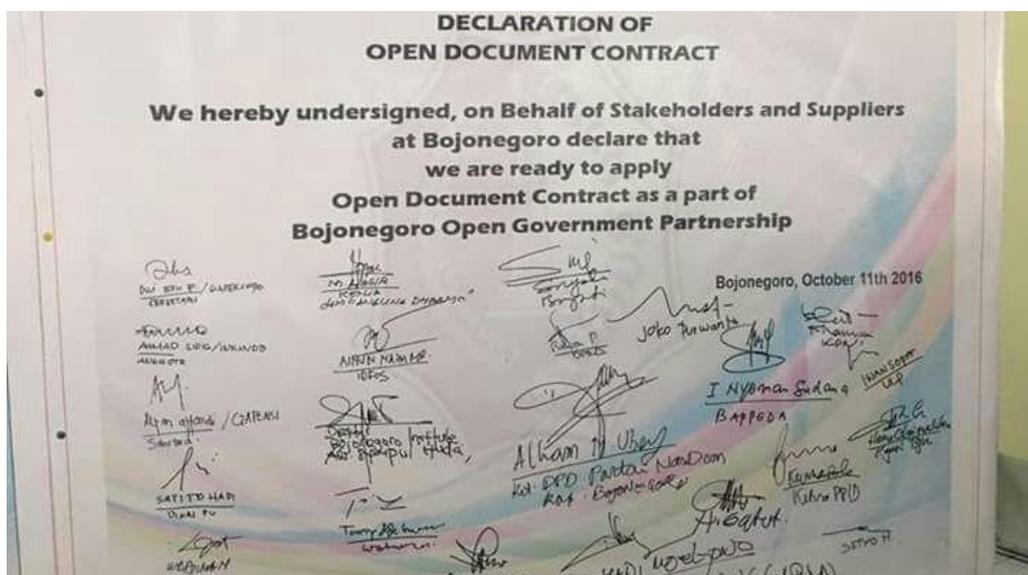
- g. SIAP LAPOR! adalah Sistem Integrasi Aplikasi Publik Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yakni seluruh layanan informasi yang ada di Kabupaten Bojonegoro baik melalui Dialog Publik, SMS Malowopati, Desk PPID maupun media layanan lainnya di integrasikan dalam aplikasi LAPOR, sehingga aduan, saran, kritik, permohonan informasi yang belum dijawab/ditindaklanjuti/dikabulkan akan teridentifikasi dengan jelas melalui aplikasi ini. Setiap jum'at pagi, tanggungjawab Badan Publik terhadap layanan informasi secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Bupati bersama-sama Kepala SKPD.
- h. Aplikasi Dasawisma Merupakan revolusi data yang sedang dikembangkan ditahun ini yakni pendataan detail di tingkat Dasawisma Desa, dalam pelaksanaannya melibatkan peran masyarakat/PKK Desa tingkat Dasawisma. Data ini merupakan data dasar terdiri dari 300 kolom yang menjelaskan dari indikator Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) meliputi 20 (dua puluh) indikator. Dengan terumuskannya data dasar desa, maka kebutuhan data dan informasi bagi masyarakat pemohon informasi akan secara cepat dapat terpenuhi.
- i. Mediatrack di tahun 2016 bekerjasama dengan Pemerintah kabupaten Bojonegoro akan membangun aplikasi Big Data untuk mensukseskan Open Government.
- j. Pada tahun 2016 Kabupaten Bojonegoro menjadi percontohan dunia sebagai Pemerintahan terbuka / Open Government Patnership, Kabupaten Bojonegoro bersama 14 kota besar lainnya di Dunia antara lain Kota Seoul (Korea Selatan), Tbilisi (Georgia), Buenos Aires, Madrid dan Skotlandia adalah percontohan Pemerintahan Daerah pertama di Asia dari 45 kota yang mendaftar pada ajang ini.

### 3. Rencana Tindak dan Target Tahun 2017

Rencana Aksi Kabupaten Bojonegoro tahun 2017, disamping melanjutkan Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro yang sudah ada yakni adanya dialog jum'at, SIAP LAPOR, Sistem Monitoring/pantau yang terkoneksi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) maupun berbagai aksi Keterbukaan Informasi lainnya juga ditahun 2017 merencanakan kegiatan Keterbukaan Informasi yang berbasis kolaboratif dengan 4 (empat) sekawan (Akademisi, Bussinesman, Government, Community). Kegiatan - kegiatan dimaksud meliputi Digitalisasi Revolusi Data, pembuatan aktivasi Webdes sebagai media Keterbukaan Informasi Pemerintah Desa, Apilikasi Open Data kontrak, penyesuaian web OPD/SKPD sesuai nomen klatur, maklumat pelayanan PPID yang kesemuannya tersebut masuk menjadi Renaksi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diajang Open Government Patnership Dunia.

Selain itu untuk mendukung kegiatan Renaksi di tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan menetapkan berbagai regulasi guna mendukung Keterbukaan Informasi baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Pemerintah Desa

Gambar 18  
Open Data Kontrak



Gambar 19  
Pelatihan Digitalisasi IT Aplikasi Update Data Dasa wisma Kader Dasa  
Wisma



# Penutup

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di tahun 2016 PPID Kabupaten Bojonegoro yang dalam ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika bersama instansi terkait telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Beberapa kegiatan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut :

1. Kategori Sistem Layanan Informasi Kabupaten Terbaik ( mendapatkan trophy + penghargaan ).
2. Kategori Apresiasi terhadap Penggerak Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa (mendapat penghargaan).
3. Kategori Meja Layanan Terbaik Kab/Kota (mendapatkan penghargaan).
4. Kategori Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi Publik Terbaik Kab/Kota (sebagai nominator).
5. Kategori Website Terinovatif Kab/Kota (sebagai nominator)
6. Sebagai Pemerintahan Terbuka yang ditunjuk dari Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI).
7. Kabupaten Bojonegoro mewakili Indonesia sebagai pilot project Pemerintahan Terbuka pertama bersanding dengan 14 kota besar di dunia

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2016, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mencapai Open Government, good and clean Government.

# Dokumentasi



Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Perbub KIP bersama DPRD Kabupaten Bojonegoro



Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD setiap Hari Jum'at Pagi sampai jam 12.00 di Rumah Dinas Bupati



Ayo Mas Bro di Pekan Pelayanan Publik Kecamatan Padangan



Layanan Informasi Publik dalam Pekan Pelayanan Publik



Revolusi Data: Pelatihan Update Aplikasi Data Dasawisma bersama Kecamatan Sekar dan Kecamatan Gondang



Revolusi Data Melalui Dasawisma seluruh Desa di Kabupaten Bojonegoro

- <http://www.kanalbojonegoro.com/buku-data-dasawisma-potret-jujur-profil-des/>
- <http://www.kanalbojonegoro.com/melihat-potret-pkk-bojonegoro-lewat-buku-dasarwisma/>
- <http://www.kanalbojonegoro.com/pkk-bojonegoro-latih-kader-isi-buku-dawis-dengan-it/>
- Bojonegoro, Revolusi Data melalui Aplikasi Data Dasa Wisma  
<https://www.youtube.com/watch?v=1b5FLrdWkNg>



Rapat koordinasi Pembahasan Permohonan Informasi



Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dengan Jurnalis Komunitas Forum Radio Bojonegoro, Forum KIM Bojonegoro, BLOGGER dan RTIK



Diskusi panel OGP untuk Kolaborasi Pembangunan Berkelanjutan



Memberikan penjelasan dan Tour Guide kepada para pengunjung Festival OGP

# Dokumen

# ***Indeks Keterbukaan Desa***

1. Instruksi Bapak Bupati Bojonegoro.
2. Surat Kepada Camat Se – Kabupaten Bojonegoro.
3. Surat Kepada OPD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
4. SK Panitia Penyelenggaraan Festival Open Government Partnership Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
5. Open Village Government Index ( Indeks Pemerintahan Desa Terbuka ).
6. Instrumen Indeks Keterbukaan Pemerintah Desa.
7. Surat Pelaksanaan Pameran OGP Kabupaten Bojonegoro kepada 7 Kecamatan.
8. Laporan Penilaian Transparansi Anggaran Desa Pada Festival OGP Tahun 2016.
9. Dokumentasi Kegiatan Indeks Keterbukaan Desa.

# LINK PEMBERITAAN On-LINE

- <http://www.beritasatu.com/nasional/360148-infid-sambut-baik-bojonegoro-jadi-percontohan-pemda-terbuka.html>
- [http://www.beritajatim.com/berita\\_migas/240806/eiti : transparansi migas masih sulit diterapkan.html](http://www.beritajatim.com/berita_migas/240806/eiti : transparansi migas masih sulit diterapkan.html)
- <http://www.idfos.or.id/ sederhana-dan-menunjukkan-ciri-khas-bojonegoro/>
- <http://kanalbojonegoro.com/ppid-bi-gelar-diskusi-evaluasi-pelayanan-informasi-publik/>
- <http://infopublik.id/read/115551/ppid-bojonegoro-sosialisasikan-kip-melalui-media-film.html>
- [http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia%20Self%20Assessment%20Report%20March%202015%20Annex%20-Tabel%20capaian%20Renaksi%20OGI%202014\\_280415\\_Publikasi.pdf](http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia%20Self%20Assessment%20Report%20March%202015%20Annex%20-Tabel%20capaian%20Renaksi%20OGI%202014_280415_Publikasi.pdf)
- <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/BI%20Eng.pdf>
- <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/IDFos%20Eng.pdf>
- <http://www.opengovpartnership.org/node/8968>
- <http://www.opengovpartnership.org/blog/ogp-webmaster/2016/04/14/press-release-fifteen-local-governments-chosen-international-open>
- <http://www.opengovpartnership.org/blog/ogp-webmaster/2016/04/12/announcing-commencement-subnational-pilot-program-15-countries>
- <http://www.opengovpartnership.org/node/9079>
- <http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/subnational-government-pilot-program>
- <http://www.suara.com/wawancara/2016/04/04/070000/suyoto-berantas-korupsi-dengan-sistem-telanjang-ala-bojonegoro>
- <http://www.tribunnews.com/regional/2016/04/08/bojonegoro-terpilih-jadi-pilot-project-reformasi-birokrasi>
- <https://news.detik.com/berita/3182955/bojonegoro-jadi-pilot-project-grand-design-reformasi-birokrasi-kemenpan-rb>
- <http://www.beritametro.co.id/jawa-timur/kemenpan-rb-jadikan-kabupaten-bojonegoro-pilot-project>
- <https://news.detik.com/berita/3183785/hebat-bojonegoro-sejajar-dengan-kota-kota-besar-dunia-soal-transparansi>

- <http://www.beritametro.co.id/jawa-timur/bojonegoro-raih-ogp-2016>
- <https://news.detik.com/berita/3187758/sejajar-dengan-paris-bojonegoro-jadi-pelopor-open-government-di-indonesia>
- <http://news.metrotvnews.com/politik/VNnxj2k-bojonegoro-disetarakan-madrid-dan-paris>
- <http://news.metrotvnews.com/read/2016/04/14/513585/kunci-bojonegoro-bisa-dianggap-selevel-madrid-paris>
- <https://news.detik.com/berita/3184727/match-pertumbuhan-ekonomi-bojonegoro-di-atas-10-persen>
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/14/23023341/Sukses.Bawa.Bojonegoro.dalam.Pemerintahan.Terbuka.Suyoto.Maju.pada.Pilkada.DKI>
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/15/07155901/Mengenal.Manajemen.Pemerintahan.Berbasis.Publik.ala.Bupati.Bojonegoro>
- <http://regional.kompas.com/read/2016/04/14/23161321/Bojonegoro.Terpilih.Jadi.Pemerintahan.Daerah.Terbuka.Tingkat.Dunia>
- <http://www.beritasatu.com/nasional/360148-infid-sambut-baik-bojonegoro-jadi-percontohan-pemda-terbuka.html>
- <http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/04/15/o5nvc812-dialog-jumat-embuskan-keterbukaan-di-bojonegoro>
- <https://news.detik.com/berita/3185814/resep-kang-yoto-wujudkan-good-clean-and-innovative-governance-di-bojonegoro>
- <http://berita.suaramerdeka.com/bojonegoro-terpilih-sebagai-percontohan-pemerintah-daerah-terbuka/>
- <https://news.detik.com/berita/3185280/politik-happy-kang-yoto-sukses-membangun-bojonegoro>
- <http://opengovindonesia.org/berita/siaran-pers-bojonegoro-terpilih-sebagai-percontohan-pemerintah-daerah-terbuka-open-government-partnership/>
- <http://www.antaraneews.com/video/25154/bojonegoro-terpilih-sebagai-percontohan-ogi>
- <http://www.antaraneews.com/video/25156/penerapan-ogi-di-bojonegoro-sejalan-nawacita>
- <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/803/Bappenas-Ajak-Bojonegoro-ikut-OGI>
- <http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/128>

- <http://infid.org/wp-content/uploads/2016/04/Siaran-Pers-Paska-Konpres-Bonojgoro-Pelopori-Open-Government-di-Indonesia-INFID-Seknas-OGI.pdf>
- <http://eksposa.com/?p=1518>
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/wakil-indonesia-di-ogp-bojonegoro-pelopor-pemerintahan-terbuka.html>
- <http://www.mediaindonesia.com/news/read/40481/bojonegoro-jadi-percontohan-pemda-terbuka/2016-04-15>
- <http://www.tokohindonesia.com/lintas-berita/artikel/1350037/bojonegoro-terpilih-sebagai-percontohan-ogi>
- <http://www.arah.com/article/2007/suyoto-bawa-bojonegoro-jadi-pelopor-open-government.html>
- <http://finansial.bisnis.com/read/20160415/9/538043/pemerintah-daerah-bojonegoro-terpilih-mewakili-open-government-partnership>
- <http://www.beritasatu.com/megapolitan/328074-lembagakan-partisipasi-publik-pemerintah-dan-masyarakat-sipil-luncurkan-kembali-ogi.html>
- <http://kabar24.bisnis.com/read/20160415/78/538208/bojonegoro-jadi-percontohan-open-government-partnership>
- <http://wartaekonomi.co.id/berita97028/bojonegoro-wakili-ri-ikuti-ajang-open-government-partnership.html>
- <http://www.bedanews.com/bojonegoro-teilih-sebagai-percontohan-pemerintah-daerah-terbuka-open-government-partnership>
- <http://suaraterkini.com/bojonegoro-terpilih-mewakili-indonesia-sebagai-percontohan-pemerintah-daerah-terbuka-di-dunia/>
- <http://www.zonalima.com/artikel/8177/Bojonegoro-Wakil-Indonesia-di-Ajang-Open-Government-Partnership/>
- <http://kebebasaninformasi.org/2015/12/03/ogi-buka-ruang-aspirasi-untuk-penyusunan-rencana-aksi-2016-2017/>
- <http://kebebasaninformasi.org/2014/11/14/bojonegoro-siap-terapkan-uu-kip/>
- <http://www.tribunnews.com/regional/2016/04/14/kabupaten-bojonegoro-wakili-indonesia-dalam-ajang-open-government-partnership>
- <http://br-online.co/bojonegoro-wakil-indonesia-di-ajang-open-government-partnership/>
- <http://www.harnas.co/2016/04/15/bojonegoro-jadi-percontohan>
- <http://www.harnas.co/2016/04/14/bojonegoro-jadi-percontohan-pemerintah-daerah-terbuka>

- <http://infobojonegoro.com/bojonegoro-satu-satunya-daerah-raih-ogp-2016/>
- <http://blokbojonegoro.com/read/article/7/20160412/bojonegoro-juga-raih-open-government-partnership-2016.html>
- <http://www.jelasberita.com/2016/04/14/mewakili-indonesia-sebagai-daerah-percontohan-bojonegoro-disetarakan-dengan-madrid-dan-paris/>
- <http://www.koran-jakarta.com/bojonegoro-pelopor-open-government-di-indonesia/>
- <http://beritabojonegoro.com/read/4327-bojonegoro-masuk-open-government-partnership-2016.html>
- <http://surabayaonline.co/2016/04/15/bojonegoro-terpilih-jadi-pemerintahan-daerah-terbuka-tingkat-dunia-apa-rahasiannya/>
- <http://www.updatepos.com/2016/04/wah-hebat-bojonegoro-terpilih-menjadi.html#sthash.7SgGLvaw.dpbs>
- <http://nasional.beritaprima.com/wow-bojonegoro-terpilih-jadi-pemda-terbuka-tingkat-dunia/>
- <http://sinarharapan.net/2016/04/open-city-bojonegoro-sejajar-dengan-paris-dan-madrid/>
- <http://www.freedominfo.org/2016/04/foi-notes-aid-transparency-ogp-tai-gambia-bahamas-india-open-data-us-uk-australia/>
- <http://austintexas.gov/blog/city-austin-chosen-join-international-open-government-partnership-pioneer-city>
- <http://demolessons.org/2016/04/14/bojonegoro-dapat-penghargaan-pemerintahan-daerah-terbuka-tingkat-dunia/>
- <http://ogp.gov.ro/societatea-civila/deschiderea-sesiunii-de-inscriere-in-cadrul-programului-pilot-al-ogp-guvernare-deschisa-la-nivel-local/>
- <https://stei.itb.ac.id/id/blog/2014/05/23/data4dev-pendeklarasian-pemerintahan-yang-terbuka/>
- <http://networkofcenters.net/news/ogp-asia-pacific-regional-conference>
- <http://cis-india.org/news/open-govt-partnership-asia-pacific-regional-conference-may-6-7-2014>
- <http://www.pressreleasepoint.com/ogp-asia-pacific-regional-conference>